

Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam

Hisny Fajrussalam, Muthia Nur Azhar, Ninda Washilatul Hasanah, Shafa Nurul Aulia, Zidan Ahmad Farhan

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: mutbiana06@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the political value of Islam in Indonesia. There are some people who think that politics is something negative that is so, even politics is needed in religious life. Some people think that politics is something negative that must be avoided. So the question arises how the influence of Islamic political values on political law in Indonesia. Islam emerged in Indonesia and developed with various theories that exist with Islamic political values, namely fairness, deliberation, and equality of rights. This research was carried out quantitatively using a survey method. Data was collected using a questionnaire in the form of a google form which was then distributed to participants. The participants in this study were the general public as many as 21 people from various circles. The process of data analysis in this study was carried out by researching and analyzing the answers given on the google form. This research proves that the implementation of politics in Indonesia is not in accordance with the political values that exist in the teachings of Islam.*

Keywords: *Politics; Political values; Islamic politics;*

Abstrak

Penelitian memiliki bertujuan untuk mengetahui nilai politik islam di Indonesia. Ada dari beberapa masyarakat menganggap bahwa politik itu sesuatu yang negatif, sedangkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Beberapa dari masyarakat menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang negatif yang harus di jauhi. Maka timbulah pertanyaan bagaimana pengaruh nilai-nilai politik islam tersebut terhadap hukum politik di Indonesia. Islam muncul di Indonesia dan berkembang dengan berbagai macam teori yang ada dengan nilai-nilai politik Islam yaitu adil, musyawarah dan persamaan hak. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk google form yang kemudian disebarkan kepada partisipan. Partisipan dalam penelitian kali ini adalah masyarakat umum sebanyak 21 orang dari berbagai kalangan. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis jawaban yang diberikan pada google form. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan politik di

Indonesia belum sesuai dengan nilai-nilai politik yang ada pada ajaran dalam islam

Kata kunci: *Politik; Nilai-nilai Politik; Politik islam*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang datang serta turun langsung dari langit yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah lalu disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Ajaran agama Islam menyebar diseluruh dunia dengan berbagai cara, salah satunya melalui jalur perdagangan yang tak terkecuali di Negara Indonesia. Agama Islam ini lahir sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini, baik petunjuk mengenai hal dunia maupun akhirat kelak, sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak manusia kearah yang lebih baik di sisi Allah SWT serta tujuan paling utama untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Berbagai cara dapat dilakukan oleh umat manusia dalam mencapai ketakwaan di sisi-Nya, salah satunya dengan “politik”. Karena politik dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Secara umum, ajaran yang ada pada agama Islam bersifat universal yang di dalamnya terdapat dasar-dasar keimanan seseorang (akidah), etika-etika dalam kehidupan atau berinteraksi (akhlak) dan sebagian besar aspek hukum (Syariah). Sedangkan, pada aspek hubungan antarmanusia di dalam kehidupan bermasyarakat hukum Islam disebutkan secara garis besar, sehingga ajaran agama Islam ini tetap relevan dengan dinamika politik di Indonesia dan sesuai dengan seiring berkembangnya zaman. Namun, dalam aspek ibadah kepada Tuhan ketentuan hukumnya disebutkan dengan sangat rinci karena sifatnya yang tetap dan tidak dapat diubah serta tidak berubah dengan adanya perubahan zaman.

¹ Yohana Oktaviani Lavan, “Implementation of Islamic Values in Indonesian Political Dynamics,” *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2021): 53–66, <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>.

Ada dari beberapa masyarakat yang menganggap bahwa politik merupakan isu yang rumit dalam kehidupan dan menganggap sesuatu yang negatif sehingga harus dihindari. Padahal tidak begitu, bahkan politik sangat berkaitan dalam hidup beragama. Sehingga timbulah berbagai keresahan terhadap nilai islam yang berpengaruh bagi hukum politik di Indonesia.²

Mayoritas penduduk yang ada di Indonesia itu beragama Islam, lalu keterkaitan agama dalam menanggapi berbagai masalah kehidupan sosial dan juga politik semakin terlihat dengan jelas, termasuk dalam menempatkan seperti apa hubungan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi hal yang diperbincangkan. Oleh karena itu, tidak heran jika pemikiran tentang Islam dan negara ini selalu menjadi diskusi dan perdebatan para ulama yang ada di negara ini sejak zaman dulu, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebaaian besar adalah cerita yang sifatnya kecurigaan (misteri) satu sama lain yang masih dipertanyakan. Salah satu butir dalam perbedaan pendapat pandangan masyarakat adalah apakah negara Indonesia bercorak “Islam” atau “nasionalis”³. Menurut Sjadzali konstruk dalam kenegaraan pertama mengharuskan Islam diakui dan diterima oleh masyarakat muslim sebagai dasar ideologi negara. Sementara itu konstruk kenegaraan kedua lebih mendesak agar negara ini didasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara⁴.

Karena pada dasarnya politik seharusnya sesuai dengan nilai-nilai islam yang terkandung. Jika politik tidak didasarkan pada nilai agama, maka negara dalam keadaan yang membahayakan. Sehingga perlunya nilai agama Islam yang dapat menjadi petunjuk serta memandu agar kehidupan politik bisa berjalan dengan aman dan damai. Indonesia bukanlah suatu negara sekuler yang dimana

² Puji Kurniawan, “Pengaruh Politik Terhadap Hukum,” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* V. 4, no. No. 1 (2018): hlm.30.

³ Rachmat Panca Putera, “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif,” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>.

⁴ Rachmat Panca Putera, “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif,” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>.

memisahkan antara kehidupan negara dan agama. Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila, menempatkan agama dalam sila pertama dan juga sebagai sumber nilai serta inspirasi bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Maka dari itu, kami memilih untuk meneliti artikel dengan judul ini dikarenakan penerapan politik di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai keislaman, bahkan terkadang, tidak melibatkan penerapan nilai keislaman di dalamnya.

Pembahasan

Perkembangan Islam di Indonesia

Menurut John, agama dan negara ini merupakan intitusi yang begitu penting dan berhubungan bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada dalam wilayah keduanya. Agama memiliki peran sebagai sumber etika moral dan kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam berinteraksi di sosial kehidupannya⁵. Berdasarkan hal yang disebutkan tadi, maka agama perlu dijadikan sebagai alat ukur petunjuk atau pedoman dalam setiap langkah, setiap perbuatan kehidupan manusia, baik ketika berinteraksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, disisi lain negara merupakan sebuah pondasi bangunan yang isinya mencakup berbagai aturan-aturan mengenai ketata masyarakatan yang harus diberlakukan atau ditaati dan memiliki suatu kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Ada saja aturan yang telah dibuat oleh negara ternyata sejalan dengan agama, tetapi ada juga aturan yang dibuat berlawanan dengan agama⁶. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa negara dan agama itu saling terikat satu sama lain. Tanpa kekuasaan negara yang memiliki sifat memaksa,

⁵ Rachmat Panca Putera, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>.

⁶ Rachmat Panca Putera, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>.

agama akan berada dalam bahaya. Tanpa agama, negara bisa menjadi suatu organisasi yang tirani⁷.

Berbagai teori muncul mengenai kapan dan bagaimana ajaran Islam masuk serta berkembang di Indonesia. Menurut berbagai teori yang sudah ada sebelumnya, ajaran agama Islam masuk ke Indonesia dari berbagai jenis bangsa. Beberapa mengatakan bahwa ajaran Islam dibawa masuk oleh pedagang yang berdagang sambil berdakwah dan ada pula yang mengatakan bahwa ajaran Islam disebarkan oleh para ulama agama yang tiba ke Nusantara tujuannya untuk menyebarkan ajaran Islam. Sejarah awal masuknya Islam dimulai dari kedatangan pedagang dari Gujarat, kemudian diikuti oleh pedagang dari Arab dan Persia. Para pedagang ini datang berdagang sambil menyiarkan agama⁸. Menurut Hamka⁹ Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, dalam teorinya Hamka mengatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang yang berasal dari Arab datang untuk berdagang kemudian menetap di Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Teorinya ini kemudian dikenal dengan nama Teori Arabia. Taufik Abdullah tidak menyetujui teori ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti yang menyatakan bahwa penduduk asli Indonesia di tempat-tempat yang biasa didatangi para pedagang beragama Islam. Pedagang yang menetap diduga hanya berdiam menetap dalam menunggu musim yang baik untuk melakukan pelayaran.

Islam masuk ke daerah Jawa melalui pesisir utara pulau Jawa dengan ditemukannya sebuah makam milik Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di wilayah Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke 18. Pemakaman Islam Kuno ditemukan di hulu Sungai Pawan. Sementara di wilayah Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai, lalu di Kalimantan Selatan ajaran Islam masuk lewat Kerajaan Banjar dan dari wilayah Kalimantan Tengah, ditemukan

⁷ Rachmat Panca Putera, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>.

⁸ Abdul Mujib, "Sejarah Masuknya Islam Dan Keragaman Budaya Islam Di Indonesia," *Devantara* XI, no. Januari-Juni 2021 (2021): 117–23.

⁹ M. Yakub, "Perkembangan Islam Indonesia," *Kalam* 7, no. 1 (2017): 135, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.446>.

Masjid Gede di wilayah kota Waringin yang dibangun pada 1434 M. Di Sulawesi, ajaran Islam masuk melalui raja dan masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo. Pengaruh dalam Kesultanan Ternate juga berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Sulawesi terutama di wilayah Tengah dan Utara. Bukti dari penyebarannya adalah keberadaan Kesultanan Gorontalo yang merupakan salah satu Kerajaan Islam yang berpengaruh di Semenanjung wilayah Utara Sulawesi hingga Tengah dan Timur Sulawesi. Kesultanan Tidore juga berhasil menyebarkan agama Islam hingga mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat¹⁰

Metode dalam penyebaran agama Islam mencakup pada hal-hal berikut, melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf serta politik. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan dilakukan ketika para pedagang berinteraksi, kemudian menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Sementara melalui perkawinan dilakukan dengan menikahi penduduk asli, terutama putri bangsawan yang ingin menikahi para pedagang sukses. Sebelum menikah, mereka terlebih dulu diharuskan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Lalu melalui Pendidikan, ajaran Islam disebarkan melalui rumah Pendidikan seperti pesantren. Kemudian melalui seni budaya, ajaran Islam diakulturisasikan dengan kebudayaan masyarakat setempat, dalam hal ini, walisongo sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Melalui tasawuf, diajarkan untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Sehingga memiliki hubungan yang langsung secara sadar dengan-Nya. Biasanya disebut juga sufi. Kemudian terakhir, melalui politik, ajaran Islam berkembang di wilayah yang biasanya pemimpinnya masuk agama Islam terlebih dahulu, kemudian disusul rakyatnya.

Perkembangan ajaran Islam sendiri sudah berkembang pesat di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dilansir dari CNN pada bulan April 2020, Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia.

¹⁰ Mujib, "Sejarah Masuknya Islam Dan Keragaman Budaya Islam di Indonesia."

Nilai-nilai Politik dalam Ajaran Islam

Menurut Schmitter & Blecher (2020) Politik adalah (jika bukan) aktivitas manusia yang paling mendasar – “ilmu pengetahuan utama” dari bidang di mana semua aktivitas manusia lainnya harus mengambil tempat. Tujuannya adalah untuk menjinakkan konflik yang tak terhindarkan yang muncul dari kebutuhan kita untuk hidup bersama dalam komunitas di bawah kondisi kelangkaan¹¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai merupakan hal-hal yang penting atau berguna bagi kehidupan kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sementara menurut Frimayanti pada tahun 2017 mengatakan bahwa nilai merupakan hal yang bersifat teoritis, yang memiliki nilai dan menggambarkan sesuatu yang atributnya dapat dilihat dari perilaku individu yang memiliki keterkaitan yang diidentikan dengan realitas, aktivitas, standar, etika dan keyakinan.¹²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
٣٠

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah : (2) : 30)

Imam Al-Qurthubi berpendapat, dikutip dari Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Baqarah ayat 30 merupakan dalil yang menyatakan kewajiban dalam pembentukan pemerintahan (khalifah) dan menghentikan segala bentuk perselisihan, permasalahan sengket

¹¹ Philippe Schmitter and Marc Blecher, “Politics as a Science: A Prolegomenon,” 2020, https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/40044/1/9780367469498_text.pdf.

¹² Fadiah Elwijaya, “Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1840–45, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>.

di tengah masyarakat, kemudian kewajiban untuk menuntut orang-orang dzalim berdasarkan hak orang yang terdzalimi, menegakkan hukum yang ada, pemberian sanksi atas tindakan keji, serta menyelesaikan masalah penting lainnya yang pelaksanaannya tidak lepas tanpa adanya pemerintahan.

Dalam Islam, politik disebut dengan *siyasah*. Asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti memerintah, mengatur atau melarang. *Siyasah* merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh satu elemen masyarakat, atau bahkan negara untuk memperbaiki keadaan yang sudah memburuk, serta memperbaiki keadaan yang sudah baik.

Islam dan Politik tidak bisa dipisahkan, karena memiliki keuntungan pada masing-masing aspek. Hal ini bisa dilihat dari Islam sebagai doktrin, dan sebagai realita sosial. Peristiwa Piagam Madinah yang terjadi pada Nabi Muhammad dengan penduduk kota Madinah, yang dilakukan oleh kelompok Anshar, Muhajirin dan Yahudi. Dalam Islam sendiri, mengenai berpolitik terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 58, dan ayat 135, An-Nahl ayat 90-91, Ali-Imran ayat 159, Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Al-Ahzab ayat 70, dan Al-Ankabut ayat 3. Berikut nilai-nilai Politik dalam ajaran Islam diantaranya adil, bermusyawarah dan persamaan hak:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنفُضُوا
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An-Nahl (16) : 90-91)

Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan untuk selalu berperilaku adil, berbuat baik, anjuran untuk memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan, larangan akan perbuatan keji, permusuhan dan kemungkaran. Dalam melaksanakan politik yang baik, tentunya diperlukan keadilan yang merata kepada rakyat yang dipimpin, serta tidak menyalahi rakyat dengan bersikap tidak adil.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨ ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa (4) : 58)

Dalam ayat ini disampaikan mengenai ajaran Islam yang diimplementasikan dalam hukum dan berpolitik, yaitu adil. Adil merupakan situasi di mana seseorang tidak berada dalam situasi berat sebelah. Implementasi yang baik dalam nilai adil ini bisa diterapkan ketika seorang pemimpin dihadapkan dengan suatu kasus, pemimpin tersebut harus bisa menindaki pelaku dalam kejahatan dengan adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ٨

Artinya:

“*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Maidah (5) : 8)

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya, seorang pemimpin haruslah bersikap adil dalam bertindak. Jangan membiarkan perasaan pribadi seperti dendam, atau kebencian terhadap seseorang dan suatu kaum untuk mengambil alih sehingga terjadi kesalahan dalam membuat keputusan. Yang seharusnya bisa adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan tetapi malah mendapatkan ketidakadilan dikarenakan adanya kebencian yang dimiliki dalam hati.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا ١٠٥

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”(QS. An-Nisa (4) : 105)

Sebab turunnya ayat ini adalah saat Tu'mah bin Ubairiq melakukan pencurian. Barang yang dia curi disembunyikan di rumah milik orang Yahudi, kemudian mengatakan orang tersebut lah yang telah melakukan pencurian. Keluarga Tu'mah kemudian meminta Nabi Muhammad saw. untuk membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi tersebut. Nabi Muhammad saw. hampir terpengaruh, namun kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ini, memperingatkan Nabi untuk tidak membela pengkhianat. Melalui peristiwa ini bisa dilihat bahwa seharusnya seorang pemimpin itu adil dalam menindaki sesuatu, tidak melihat kepada latar belakang yang dimiliki, serta berusaha mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi, kemudian menindaki hal tersebut sesuai dengan ganjarannya.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَأَلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ﴾

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslabatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa (4) : 135)

Melalui ayat ini, menurut tafsir dari Ibnu Katsir, Allah Swt. menegaskan untuk menegakkan keadilan, jangan pernah melupakan

keadilan sedikitpun, dan jangan berhenti untuk menegakkan keadilan meskipun banyak orang yang mencemooh, serta dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat mereka beralih dari keadilan.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُضِّتُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran (3) : 159)

Berdasarkan ayat ini, disampaikan bahwasanya musyawarah itu penting. Dalam politik, dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya diperlukan musyawarah yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Jika dalam mengambil sebuah keputusan, anggota tidak dilibatkan, maka dikhawatirkan keputusan tersebut akan memicu kesenjangan antar anggota. Politik yang baik adalah politik yang terbuka dan melibatkan anggotanya dalam segala pengambilan keputusan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat (49) : 13)

Melalui ayat ini, ditunjukkan bahwasanya, dalam berpolitik, harus menerapkan persamaan hak. Tidak melihat dari *gender*, agama, ras dan suku yang dimiliki oleh setiap individu. Jika tidak terdapat persamaan dalam pemerolehan hak, maka nilai keadilan juga tidak

dapat diwujudkan. Jika nilai keadilan tidak dapat diwujudkan, maka pelaksanaan politik yang baik juga hanya sebatas angan-angan saja.

Hasil pengumpulan data yang kami dapatkan dengan menggunakan metode survei, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan melalui google form kepada responden. Didapatkan data mengenai pelaksanaan politik yang baik. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi pendapat mereka mengenai pelaksanaan politik yang baik.

Tabel.1
Pendapat Mengenai Pelaksanaan Politik yang Baik

Subjek	Pelaksanaan Politik yang Baik
1	Menurut saya pelaksanaann politik yang baik salah satunya adalah pemimpin melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah, tidak mementingkan egonya sendiri
2	Yang menguntungkan banyak pihak
3	Pelaksanaan politik yang baik adalah terciptanya kebijakan untuk public yang mengantarkan masyarakat sebagai focus utama dalam kesejahteraan
4	Berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama maupun politik itu sendiri. Karena politik yang baik belum tentu benar, tapi yang benar insyaAllah baik
5	Politik yang baik adalah yang dibuat berdasarkan hukum-hukum islam

Dengan pernyataan yang telah dipaparkan oleh 5 responden pada tabel 1. Mereka berpendapat bahwa politik yang baik yaitu memberikan manfaat untuk banyak orang, dan tidak hanya mementingkan beberapa pihak saja. Selain itu politik yang baik harus berlandaskan dengan hukum islam, karena jika politik tanpa adanya hukum islam maka akan terombang-ambing dalam kepentingan

urusan manusia. Dampaknya akan banyak kekecewaan yang terjadi kepada banyak orang, karena mereka merasa dirugikan sebelah pihak. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari para responden bahwa masyarakat merasa dikecewakan karena politik di Indonesia sendiri tidak sejalan dengan semestinya.

Data selanjutnya mengenai pelaksanaan politik di Indonesia. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi pandangan mereka mengenai pelaksanaan politik di Indonesia.

Tabel.2

Pelaksanaan Politik di Indonesia

Subjek	Pelaksanaan Politik di Indonesia
1	Menurut saya di Indonesia sendiri keadaan politiknya jauh dari kata baik, karena banyak sekali pemimpin yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan pribadi
2	Dalam hal pelaksanaan politik, Indonesia kiranya kurang berjalan baik dari beberapa dekade terakhir seperti produk kebijakan, pengawasan dalam hal pelaksanaan evaluasi hasil yang tidak terarah
3	Saat ini pelaksanaan politik masih perlu ditingkatkan karena masih banyak ketidakadilan dan kecurangan
4	Menurut saya belum, karena saya rasa politik di negara Indonesia saat ini masih terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta mandang seseorang lewat jabatan dan kekayaan
5	Diatas kertas sudah cukup baik, namun pelaksanaannya belum

Adanya pernyataan telah yang diungkapkan oleh lima responden pada tabel ke 2. Ini membuktikan bahwa politik di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan untuk banyak orang, terdapat adanya kecurangan serta ketidakadilan yang terjadi. Menurut ¹³ Kebenaran yang seharusnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat telah terdistorsi oleh kepentingan tertentu, sehingga manusia menjadi tuna adab. Lemahnya iman serta taqwa umat manusia kepada Tuhan menjadi salah satu akibat yang menyebabkan tidak terarahnya peraturan untuk menata hidup manusia sehingga menjadi menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam hukum Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, perlu adanya keharusan untuk merubah adab berdasarkan dengan peraturan (hukum) yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga akan terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa politik yang sehat yang didalamnya selalu melibatkan nilai-nilai islam. Hal itu dipertegas dengan pernyataan para responden mengenai pandangan mengenai politik dalam agama islam.

Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi pendapatnya mengenai politik dalam agama Islam.

Tabel.3

Pandangan Berpolitik dalam Agama Islam

Subjek	Politik dalam Agama Islam
1	Tentu, islam memfasilitasi umatNya untuk berpolitik, politik dalam islam sudah ada sejak dulu bahkan ketika masa penggantian kepemimpinan setelah Rasulullah. Islam juga tentu sudah mengatur politik yang sesuai dengan ajarannnya bahkan tentu ada dalil-dalilnya
2	Dalam islam diajarkan untuk memiliki sifat pedulian dalam semua urusan manusia yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan mereka, untuk mempelajari apa yang harus dilakukan penguasa

¹³ Yogi Prasetyo, "Adab Sebagai Politik Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 112, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978>.

	terhadap rakyat, serta mencegah adanya kedzaliman dari penguasa
3	Pandangan saya, ya politik islam itu baik seperti zaman Rasulullah dahulu. Salah satunya para pemimpin dahulu berlaku adil membuat rakyat damai
4	Berpolitik merupakan salah satu cara untuk mengubah kaum. Hal ini dikarenakan jika seseorang masuk ke dalam politik, maka ia mempunyai power untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan syariat

Dengan pernyataan yang telah diisi 4 responden pada tabel 3 di atas, mereka berpendapat politik dalam agama islam itu sangat baik diterapkan, karena akan memberikan hasil yang adil bahkan dapat mensejahterakan banyak pihak, para responden juga berharap politik harus dikaitkan dengan islam sebagaimana jawaban responden dalam diagram berikut.

Diagram.1
Pendapat mengenai Politik dikaitkan dengan Agama Islam



Dari hasil diagram 1 di atas, menunjukkan hasil yang cenderung lebih banyak memilih “Ya” ini membuktikan bahwa mereka mengharapkan aturan politik yang dikaitkan dengan Islam, karena jika nilai keIslamannya ditegakkan dalam urusan berpolitik maka tidak akan ada hal yang melenceng dari aturan yang sesuai dengan syariat islam.

Negara Indonesia ini perlu adanya kebijakan yang tegas untuk mengatur kepentingan politik dikaitkan dengan nilai-nilai islam, dan diharapkan mampu menjadi wadah untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut diperkuat pernyataan alasan para partisipan pada tabel dibawah ini. Sebagai berikut :

Tabel.4

Alasan Politik perlu dikaitkan dengan Agama Islam

No	Alasan
1.	Pandangan saya, ya politik islam itu baik seperti zaman Rasulullah dahulu. Salah satunya para pemimpin dapat berlaku adil membuat rakyat hidup damai.
2.	Ya, agar politik berjalan dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
3.	Ya karena islam telah mengatur semua praktek kehidupan manusia.
4.	Tidak ada yang bisa dipisahkan dari agama islam sebab pada dasarnya kehidupan di dunia juga bagian dari jalan kehidupan yang telah ditentukan Allah Swt. yang diketahui sebagai salah satunya Tuhan bagi penganut agama islam.

Dari penjelasan 4 responden pada tabel 4, memperkuat data yang menunjukkan bahwa politik harus dikaitkan dengan islam, kita mengingat zaman Rasulullah terdahulu segala kegiatan aktivitas manusia disangkut pautkan dengan syariat islam. Rasulullah selalu menyayomi serta melindungi setiap warganya tentang eksistensi negara dan pemerintahan dalam islam. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, keimanan dan ketakwaan, adil, amanah serta jujur ini merupakan nilai-nilai politik yang sesuai Fiqih Siyasah, jika dilihat dari nilai-nilai politik tersebut, Indonesia sendiri masih jauh dari nilai-nilai politik dalam islam. Banyak sekali pelaku yang masih korupsi, tidak adil dengan rakyat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para responden pada tabel di bawah ini. Sebagai berikut.

Tabel.5
Implementasi Nilai Islam dalam Politik di Indonesia

No.	Pendapat
1	Menurut saya belum, karena di Indonesia masih banyak sekali pemimpin yang zolim seperti korupsi, nepotisme, dari contoh itu saja sudah tidak mencerminkan kepatuhan dalam nilai politik islam
2	Belum. Karena masih banyak pelaku politik yang tidak amanah, bermain curang dan tidak jujur. Namun, itu memang permainan di dunia politik.
3	Nilai tersebut memang menjadi pegangan erat untuk diimplementasikan tetapi dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti dalam sisi keadilan, di mana banyak politisi yang melakukan kecurangan demi kepentingan sendiri. Dari ketidakadilan tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai yang lain.
4	Belum, menurut saya politik di Indonesia belum berada dalam tahap adil, amanah, serta jujur. Masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan politik untuk suatu keuntungan beberapa hal.

Dilihat dari pernyataan 4 responden pada tabel 5, alasan yang didapat dari para responden menjelaskan bahwa implementasi politik di Indonesia masih belum sesuai dalam nilai politik dalam islam. Dengan merosotnya moral serta etika masyarakat Indonesia akan mempengaruhi kegiatan politik serta kegiatan-kegiatan yang lain. Adab adalah prinsip dasar islam, yang isinya mengenai nilai dan kaidah hukum yang mengatur manusia bertindak supaya mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Menurut¹⁴ Adab sebagai politik hukum islam menjadi dasar Bergeraknya aktivitas manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Orang yang beradab adalah orang yang baik perbuatannya yang menyadari tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah SWT, memahami dan melakukan keadilan terhadap dirinya juga kepada orang lain dalam bermasyarakat, selalu berupaya untuk meningkatkan aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan demi mewujudkan manusia yang memiliki adab. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan politik di

¹⁴ Yogi Prasetyo, "Adab Sebagai Politik Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 112, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978>.

Indonesia belum sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan diharapkan kedepannya politik di Indonesia bisa berjalan sesuai adab dan nilai-nilai keislaman agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Pengaruh Politik Islam terhadap Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem politik dan pemerintah masing-masing, namun pelaksanaan politik yang dilakukan di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi sendiri secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *“demos”* dan *“kratos”*. *Demos* memiliki arti masyarakat sementara *kratos* memiliki arti pemerintahan. Demokrasi merupakan wujud pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Abraham Lincoln mengenai demokrasi *“the government from people to people, by the people and for the people”*.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, sudah seharusnya bagi orang-orang yang terpilih menjadi perwakilan dari rakyat agar bisa menerapkan sistem demokrasi ini dengan maksimal, tidak adanya pilih kasih agama, ras, dan suku. Dengan sistem ini tentu para perwakilan rakyat atau pemerintah harus bisa berlaku adil terhadap semua masyarakat yang ada.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin, dimana kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya mengenai kepemimpinan serta sistem politik. Ketaatan, keimanan, keadilan, musyawarah serta kejujuran terbahas dengan rinci dalam agama Islam, tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Banyak artikel serta isu yang selalu ingin mengaitkan agama Islam dengan sistem politik yang ada Indonesia, karena sistem politik di Indonesia itu sendiri belum sepenuhnya memberikan keadilan terhadap rakyatnya terutama rakyat yang mayoritas muslim. Sistem demokrasi ini jelas cukup baik bagi negara yang memiliki keberagaman suku, ras, etnis dan agama. Dan itu semua akan tercapai maksimal jika keadilan dalam rakyat ini dilaksanakan dengan baik.

Implementasi pengaruh Islam terhadap politik di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di Negara Indonesia masih kurangnya keadilan yang harus diterapkan kepada rakyat. Pembangunan politik Indonesia ini harus memiliki kepedulian penuh

serta keterbukaan kepada rakyat. Melalui seluruh proses pengakraban negara dengan hukum Islam saat ini harus tetap dilakukan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Secara teori demokrasi di Indonesia sudah terimplementasi cukup baik, namun secara praktik yang perlu diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat masih tetap harus dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan praktik demokrasi agama, jarang ditemukan hambatan yang serius. Pemisahan dalam urusan agama dan politik memperkuat landasan tersebut. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaan praktiknya, agama lebih banyak mengedepankan ajaran spiritual dan kelonggaran dalam penerapannya termasuk menjadi salah satu faktor pendorongnya. Hampir seluruh negara di Amerika Utara, Australia dan Eropa di mana negara-negara tersebut mengedepankan paham sekularisme sehingga urusan agama dengan politik terpisah, agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan politik juga menjadi urusan individu masing-masing sehingga tidak adanya hambatan yang terjadi.

Mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi sudah menjadi perhatian bagi para pemikir muslim seperti Muhammad Iqbal, al-Maududi, Mahmud Thaha dan sejumlah pemikir lainnya. Prinsip awalnya, tidak semua ajaran demokrasi relevan dalam ajaran Islam. Dalam konsep *theo-democracy*, yaitu suatu bentuk demokrasi religius merupakan salah satu alternatif dalam menghubungkan pandangan di atas. Ketika pandangan demokrasi menjadi suatu keharusan bagi negara untuk diimplementasikan, maka arah kehidupan secara keseluruhan tidak lepas dari singgungan mengenai demokrasi, termasuk juga agama. Agama bersifat dogmatis absolut bagi para pemeluknya, harus masuk pada ruang diskusi di mana bagaimana urusan agama bisa sejalan dan bisa menemukan titik temu yang sesuai dengan pelaksanaan demokrasi.

Kondisi yang berbeda terlihat di negara-negara muslim, khususnya pada wilayah Asia dan Afrika Utara. Demokrasi pada agama tidak harus selalu berdampingan dengan implementasi praktik demokrasi politik. Dalam banyak kasus, demokrasi seringkali dianggap tabu dan bertentangan. Munculnya kelompok-kelompok perlawanan seperti Boko Haram, al-Sabab, Jamaah Islamiyah, Islamic State dan al-Qaeda merupakan contoh dari bagaimana demokrasi masih

mengalami pertentangan dari beberapa pihak. Terutama saat masuknya demokrasi agama. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa kegagalan akan demokrasi di negara-negara muslim diakibatkan oleh adanya perbedaan karakter dari budaya masyarakat islam yang kurang ramah pada konsep-konsep dari liberalisme dunia Barat.¹⁵

Peristiwa Pemerintahan Mursi di Mesir yang pemerintahannya didominasi oleh kalangan islamis tidak juga berhasil memenuhi ekspektasi yang sudah diberikan oleh rakyat, sehingga pada akibatnya malah memunculkan gelombang massa demonstrasi yang menyuarakan protes menuntut mereka untuk mundur. Peristiwa tersebut menimbulkan adanya keraguan mengenai ideologi bersifat tidak kondusif ketika diterapkan menjadi asas suatu negara. Ikhwanisasi yang juga dicetuskan oleh kelompok islamis dan kegagalan melambungkan tinggikan ekonomi dalam pemerintahan Mesir era pemerintahan Mursi, sehingga dijadikan alasan kuat oleh militer untuk melengserkan penguasa yang menduduki kursi penguasa. Sirna harapan untuk penegakkan demokrasi sejati dengan kemunculan 'politik zero-sum'. Padahal ketika akhir 2011 atau awal 2012 di sejumlah negara seperti Yaman, Bahrain, Suriah, Mesir dan Tunisia, kaum Islamis berhasil memenangkan pemilihan umum, yaitu Pattai Kebebasan dan Keadilan (sayap Ikhwan al-Muslimin), Partai al-Nour (Salafi) dan Partai Nahda di Tunisia sudah memenangkan krusi terbanyak di Parlemen. Peristiwa pelengseran pemerintahan Presiden Mesir yang terjadi menyebabkan ketidakpastian akan transisi demokrasi dalam Dunia Arab.

Setelah Perang Dunia ke-2, ideologi sekuler seperti Komunisme, Sosialisme, Nasserisme, dan Baathisme diadopsi oleh negara-negara Arab kecuali Arab Saudi. Padahal, sejumlah ideologi tersebut tidak ramah. Pemerintahan yang terbentuk dari ideologi tersebut kebanyakan berasas otorisme atau kediktatoran militer. Pertentangan yang kuat datang dari kelompok-kelompok islam, terutama al-Ikhwan al-Muslimun dan dari berbagai kelompok spinter,

¹⁵ Abdul Jalil, "Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2020): 430–45, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121>.

hal ini sangat dipengaruhi oleh kesukuan dan sektarinisme. Perkembangan sepanjang dua dasawarsa millennium baru, pada 2000 dan seterusnya justru tidak membuat dunia Muslim mengalami perubahan. Peristiwa ini merupakan salah satu periode paling gelap dan berat dalam sejarah dalam dunia Muslim (Afrika, Asia Selatan dan Arab), dikarenakan tidak ada tanda-tanda bahwa krisis ini dapat diselesaikan dengan segera, contoh kasusnya seperti terorisme dan kekerasan yang sekarang melanda di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim (Afrika, Asia Selatan dan Arab) yang dilakukan oleh sekelompok radikal tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan islam seperti al-Qaidah, ISIS, Taliban, Boko Haram, dan al-Shahab. Sejumlah kelompok tersebut terus-menerus menyebabkan Perang Saudara di Irak, Suriah, Yaman dan Afghanistan, sehingga menyebabkan tingginya angka migrasi dari Dunia Arab dan Asia Selatan ke benua Eropa, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Australia.

Kaum Muslimin Indonesia sudah menerima demokrasi sejak masa kemerdekaan. Umumnya, mereka memandang bahwa Islam sudah sesuai dengan demokrasi. Muslim Indonesia banyak berpartisipasi dalam semua tahapan peristiwa demokrasi Indonesia. Sejumlah muslim diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan pada sejumlah lembaga legislatif dan eksekutif. Transisi demokrasi berbasis Islam di Indonesia juga mengalami kelancaran karena masyarakatnya berbasis Islam seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain.

Peristiwa pembentukan Negara Islam yang dilakukan oleh DI/TII, NII yang tidak menerima Pancasila mengalami kegagalan karena tidak menerima dukungan Muslim dari arus utama. Pada saat ini, terdapat kelompok berorientasi transnasional seperti HTI yang berambisi membentuk kekhalifahan dan kelompok Salafi transnasional yang juga berusaha untuk memurnikan praktik dan pemahaman Islam di Indonesia. Terdapat kesalahpahaman dan salah pengertian mengenai konsepsi daulah Islamiyah dan khalifah, juga mengenai Islam yang idealistik dengan Salafi, Azyumardi Azra berpendapat bahwa tidak ada satupun model negara Islam di dunia ini yang benar-benar bisa dijadikan prototipe negara Islam, sekalipun itu adalah Arab Saudi, Pakistan ataupun Iran. Klaim dari negara-negara ini sebagai negara Islam, realitanya belum memenuhi kriteria dalam

negara Islam yang ideal. Arab Saudi seringkali menyatakan sebagai negara Islam, menerapkan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, namun kenyataannya dalam Islam tidak terdapat konsep pemerintahan berbentuk kerajaan.¹⁶

Penutup

Pelaksanaan politik yang sesuai dengan agama Islam di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya, karena seperti yang kita lihat masih minimnya keadilan di dalam Negara ini, masih ada beberapa pemimpin yang lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan keadilan di negeri ini, serta kejujuran yang kurang, dimana masyarakat ingin merasakan agar pemimpin mereka lebih terbuka terhadap rakyatnya.

Pandangan islam terhadap politik terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 30 dimana Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, para manusia di perintahkan untuk menjadi pemimpin, tetapi dalam kepemimpinan itu tentu saja ada beberapa nilai islam yang telah diatur dan harus diterapkan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi.

Dengan kesimpulan diatas, maka saran untuk kedepannya adalah Indonesia perlu mengalami perubahan dalam bidang politik, dengan menanamkan moral serta adab yang sesuai dengan syariat islam, maka hukum politik di Indonesia akan sejalan dengan nilai-nilai keislaman sehingga terciptanya negara yang sejahtera.

¹⁶ Abdul Jalil, "Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2020): 430–45, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121>.

Daftar Pustaka

- Elwijaya, Fadiyah. “Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1840–45. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>.
- Jalil, Abdul. “Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2020): 430–45. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121>.
- Kamsi, Kamsi. “Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2011): 41–68. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1232>.
- Lavan, Yohana Oktaviani. “Implementation of Islamic Values in Indonesian Political Dynamics.” *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2021): 53–66. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>.
- Mawazi, Abd. Rahman. “Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensi Di Indonesia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 137–55. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1448/1254>.
- Mujib, Abdul. “Sejarah Masuknya Islam Dan Keragaman Budaya Islam Di Indonesia.” *Devantara* XI, no. Januari-Juni 2021 (2021): 117–23.
- Prasetyo, Yogi. “Adab Sebagai Politik Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 112. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.978>.
- Puji Kurniawan. “Pengaruh Politik Terhadap Hukum.” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* V. 4, no. No. 1 (2018): hlm.30.
- Putera, Rachmat Panca. “Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif.” *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 01 (2018): 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>

- Schmitter, Philippe, and Marc Blecher. "Politics as a Science : A Prolegomenon," 2020. https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/40044/1/9780367469498_text.pdf.
- Yakub, M. "Perkembangan Islam Indonesia." *Kalam* 7, no. 1 (2017): 135. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.446>.